



Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

Immanuel Gok Asiniroha Hariandja¹ Didin Muhafidin²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
Immanuel20001@mail.unpad.ac.id

Received : Jan 29, 2024; Accepted : March 18, 2024

DOI 10.25299/jiap.2024.16203

Abstract

This research was conducted with the aim of understanding the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Ciwangi Village, Balubur Limbangan District, Garut Regency. Several issues were identified in the implementation process, causing it to not run smoothly. This was due to various factors related to policy substance, the behavior of implementers, network interaction, target group participation, and resources in the implementation in Ciwangi Village, Balubur Limbangan Subdistrict, Garut Regency. The theory used in this research is the policy implementation theory proposed by Muchlis Hamdi (2014), which consists of policy substance, the behavior of implementers, network interaction, target group participation, and resources. This research utilized a qualitative research method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informant selection technique employed was purposive sampling, with a total of 8 informants. The findings indicate that the implementation of the Family Hope Program in Ciwangi Village, Balubur Limbangan District, Garut Regency, has not fulfilled several factors crucial for the success of policy implementation. However, there are also factors that have been fully met, such as policy substance and network interaction.

Key Words : Policy Implementation, Family Hope Program, Ciwangi Village

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Beberapa permasalahan ditemukan dalam proses implementasi program tersebut sehingga menyebabkan prosesnya belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya dalam pelaksanaannya di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi (2014) yang terdiri dari substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut belum memenuhi beberapa faktor yang menjadi faktor keberhasilan suatu usaha implementasi kebijakan. Namun disamping itu terdapat juga faktor yang telah terpenuhi sepenuhnya, yaitu faktor substansi kebijakan dan interaksi jejaring kerja.

Key Words : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Desa Ciwang

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang menjadi tantangan secara global dan yang paling mendalam di abad ke-21 ini. Fenomena kemiskinan berdampak serius pada kualitas hidup masyarakat di berbagai negara. Masalah kemiskinan sering kali melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki permasalahan kemiskinan yang serupa dengan negara berkembang lainnya. Kemiskinan menyangkut banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan finansial. Menurut Kementerian Sosial, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu yang menjadikan individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang layak, mencakup pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (BPS, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2023, penduduk Indonesia telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa. Badan Pusat Statistik mempublikasi data tingkat kemiskinan nasional pada bulan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta jiwa, turun 0,46 juta jiwa terhadap September 2022. Angka tersebut masih cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia meskipun terdapat penurunan masyarakat miskin pada September 2023. Tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia menjadikan kemiskinan menjadi suatu masalah yang pelik. Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meminimalisasi permasalahan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menciptakan berbagai program untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Terdapat dua strategi yang harus dilaksanakan dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka dari berbagai macam aspek. Kedua, melatih mereka agar memiliki kemampuan dasar untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kemiskinan yang baru.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan versi penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah mengimplementasikan beragam inisiatif untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial, program yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, dan program yang mengutamakan pemberdayaan usaha kecil. Program-program ini dikelola oleh berbagai bagian pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk melaksanakan berbagai program tersebut, pemerintah mengambil keputusan untuk membuat kebijakan dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berbagai program telah diciptakan oleh pemerintah demi percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu program untuk mencapai tujuan tersebut adalah program bantuan sosial berbasis keluarga, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program unggulan Kementerian Sosial yang termasuk kedalam Program

Penanggulangan Kemiskinan Klaster I. Dilansir dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sasaran, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sesuai dengan Pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018, PKH memiliki 5 tujuan dasar, yaitu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Kementerian sosial bersinergi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan. Pada tingkat provinsi, terdapat Unit Pengendali Program Keluarga Harapan (UPPKH), dan di tingkat kabupaten/kota terdapat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) kabupaten/kota. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini disebut sebagai Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) yang tergolong kedalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Program Keluarga Harapan saat ini telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya adalah di Kabupaten Garut. Program Keluarga Harapan dilaksanakan di semua kecamatan se-Kabupaten Garut. Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan dipilih sebagai objek penelitian oleh penulis karena pada tahap III proses penyaluran bantuan PKH, Kecamatan Balubur Limbangan merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak di Kabupaten Garut, dengan jumlah 5.968 KPM. Pemilihan objek penelitian di Desa Ciwangi juga karena desa ini yang merupakan bagian dari Kecamatan Balubur Limbangan menjadi desa dengan jumlah KPM terbanyak di Kecamatan Balubur Limbangan. Kondisi tersebut cukup menarik untuk dibahas mengingat dengan jumlah KPM yang dapat dikatakan cukup banyak tersebut, dapat dilihat dan diteliti apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, belum ada penelitian tentang implementasi Program Keluarga Harapan di desa ini. Sasaran dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi, ini meliputi sebagian besar penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani yang sampai saat ini dapat dikatakan tidak mampu membiayai anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah, ibu hamil, dan lansia yang tidak dapat membiayai kebutuhan hidupnya sendiri.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, masih banyak ditemukan keluarga di Desa Ciwangi yang masih berada dalam kategori keluarga prasejahtera, yaitu 1566 keluarga, dimana mereka tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 indikator kebutuhan dasar keluarga. Selain itu, jumlah KPM yang terdaftar

sebagai penerima bantuan PKH di Desa Ciwangi relatif banyak. Akan tetapi, SDM dari pendamping PKH desa dirasa kurang dibandingkan dengan pendamping di daerah lainnya pada Kabupaten Garut, sehingga pendamping PKH Desa kerap kali merasa kerepotan karena harus menangani ratusan KPM. Terakhir, ditemukan beberapa KPM yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu salah satunya menghadiri pertemuan kelompok (P2K2) dan pemeriksaan kesehatan wajib. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan seperti jauhnya jarak lokasi pertemuan dengan rumah dari peserta pertemuan kelompok tersebut.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Kajian mengenai kebijakan publik merupakan bagian dari bidang ilmu administrasi publik. Leonard D. White (1957) mengungkapkan bahwa administrasi publik, dalam lingkup yang lebih luas, melibatkan segala kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan umum pemerintah (Kadir, 2020). Pada intinya, kebijakan publik memiliki makna bukan sekedar memfokuskan pada apa yang dirumuskan oleh pemerintah, tetapi terdapat kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Ini mengacu pada pengertian kebijakan publik yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye (1981), yang menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Rusli, 2013). Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik.

Siklus Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki sebuah siklus. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai tahapan dari siklus kebijakan publik. F. Fischer, G.J Miller, dan M. Sidney mengemukakan bahwa siklus kebijakan publik terdiri dari 4 tahap, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penetapan Agenda atau *Agenda Setting*
Agenda Setting merupakan tahapan awal dari siklus kebijakan public. Proses penting yang terjadi dalam penetapan agenda ini adalah berubahnya pengenalan isu menjadi agenda politik formal. Sebuah isu dapat masuk kedalam agenda publik bukan dari masalah objektif.
- (2) Formulasi Kebijakan
Dalam tahap formulasi, para pihak yang terlibat harus menghimpun dan menelaah semua aspek yang terkait dengan isu kebijakan. Mereka harus menciptakan beragam opsi kebijakan dan melakukan diskusi sampai tercapainya suatu kebijakan yang terpilih (Suharno, 2016).
- (3) Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan tahapan eksekusi kebijakan. Implementasi menjadi proses untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah diformulasikan sebelumnya agar tujuan yang telah ditetapkan pada tahap formulasi dapat dicapai. Pada tahap ini, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari sumber daya dan merancang struktur organisasi yang akan melaksanakan kebijakan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar (Suharno, 2016)
- (4) Evaluasi kebijakan
Evaluasi kebijakan merupakan proses dianalisisnya suatu kebijakan dalam penilaian indikator dan pengaruh.

Evaluasi juga ditujukan untuk memberikan masukan terkait perubahan atau penyesuaian kebijakan yang sudah dievaluasi.

Implementasi Kebijakan

Secara sederhana, Jones (1991) menggambarkan implementasi sebagai "menyelesaikan pekerjaan" dan "melakukan itu" (Pramono, 2020). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dapat dijalankan dengan lancar. Menurut definisi Webster dan Roger dalam (Hill & Hupe, 2013), implementasi mencakup melakukan, mencapai, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi merujuk pada bagaimana kebijakan dijalankan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tachjan (2006), Implementasi Kebijakan Publik bisa dicermati dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang politik dan sudut pandang administratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses dalam siklus kebijakan publik, dimana kebijakan publik yang telah diformulasikan kemudian dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan

Muchlis Hamdi (2014) dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi", berpendapat bahwa ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.

Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Faktor	Indikator
Substansi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan 2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain
Perilaku tugas pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja 2. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang 3. Kemampuan pembelajaran
Interaksi jejaring kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama antarpelaksana 2. Hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana 3. Kecukupan peralatan 4. Ketersediaan informasi 5. Ketepatan teknologi

Sumber: Hamdi, 2014

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dimana hal tersebut berupa pengamatan terhadap kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan perilaku orang-orang (Abdussamad, 2021). Hal ini dilakukan agar penulis mengungkap dan menggali lebih dalam informasi tentang implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena sosial,

khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut menjadi lokasi penelitiannya. Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan empat cara yakni melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik triangulasi dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan catatan tertulis/dokumentasi. Sumber informan dari penelitian ini yaitu pegawai Dinas Sosial Kabupaten Garut, Pendamping PKH Desa Ciwangi, Sekretaris Desa Ciwangi, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ciwangi, dan masyarakat Desa Ciwangi. Triangulasi merupakan proses penelitian dengan menggunakan berbagai data, menggunakan lebih dari satu teori, berbagai teknik analisa dan melibatkan banyak peneliti. Data yang dihimpun dari wawancara akan dijadikan bahan perbandingan untuk melihat keseluruhan hubungan antar data yang terkumpul. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan proses verifikasi data melalui pengamatan langsung dan pemeriksaan dokumen untuk memastikan validitasnya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Muchlis Hamdi (2014) untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Muchlis Hamdi (2014) dipengaruhi oleh 5 faktor yang perlu untuk diperhatikan.

Substansi Kebijakan

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan menurut Muchlis Hamdi adalah substansi kebijakan. Faktor ini digunakan untuk menganalisis spesifikasi isi kebijakan dan keselarasan isi suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Dengan berlandaskan pada faktor ini, penulis akan menganalisis spesifikasi isi dan keselarasan antara isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai peraturan teknis pelaksanaan PKH di Kabupaten Garut, termasuk di Desa Ciwangi. Penulis juga akan menganalisis bagaimana keselarasan antara isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin dengan isi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial sebagai dasar hukum pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kabupaten Garut, tidak ditemukan adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pelaksanaan program tersebut. Para aktor pelaksana merasa dengan adanya Permensos Nomor 1 Tahun 2018 sudah dapat menuntun mereka untuk melaksanakan program tersebut dengan baik. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah dapat dikatakan spesifik dalam menjelaskan teknis pelaksanaannya. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan sistem pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan orang tua, menjadi panduan bagi penyelenggara atau pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan, serta menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjadi sasaran PKH agar dapat memenuhi kewajibannya demi optimalnya pelaksanaan PKH. Namun, agar pelaksanaan PKH di

Kabupaten Garut dapat mencapai tingkat optimal, diharapkan Pemerintah Kabupaten Garut membuat Peraturan Daerah yang secara khusus menjelaskan teknis pelaksanaan PKH di wilayah tersebut, sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Terkait dengan keselarasan, sebagai peraturan yang menjadi pelaksana kebijakan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentunya memberikan penjelasan dan cakupan yang lebih terperinci mengenai tugas dan fungsi penyelenggara atau pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan ini dapat mengatur berbagai ketentuan yang tidak tercakup dalam peraturan yang berada di atasnya. Oleh karena itu, kontennya sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan PKH, yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pada dimensi substansi kebijakan, Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi sudah dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu juga peraturan yang menaungi program ini, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 telah selaras dengan kebijakan lain yang berada di atasnya.

Perilaku Tugas Pelaksana

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Muchlis Hamdi adalah faktor perilaku tugas pelaksana. Faktor ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis sejauh mana motivasi kerja yang dimiliki oleh pelaksana, kecenderungan penyalahgunaan wewenang, dan kemampuan pembelajaran. Hasibuan (2009:141) menyatakan bahwa motivasi kerja adalah faktor-faktor yang memicu, mengarahkan, dan memberikan dukungan terhadap

perilaku manusia, agar bersedia bekerja dengan tekun dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2009:115) motivasi kerja merupakan alasan seseorang untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berlandaskan faktor tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja para pelaksana PKH di Desa Ciwangi agar dapat meningkatkan kemampuan dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya di Desa Ciwangi.

Faktor perilaku tugas pelaksana dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi. Hal ini melibatkan peningkatan motivasi dan kemampuan melalui kegiatan peningkatan SDM PKH tingkat Kabupaten dan rapat koordinasi SDM PKH. Selain itu, para pelaksana cukup termotivasi untuk bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal kecenderungan penyalahgunaan wewenang, terdapat tata tertib, tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam SK para pendamping dimana hal tersebut mencegah kecenderungan penyalahgunaan wewenang dari para pelaksana PKH. Dalam hal kemampuan pembelajaran, pendamping PKH Desa Ciwangi berusaha untuk memahami dan menyesuaikan bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat agar para KPM lebih dapat mudah memahami materi yang disampaikan oleh pendamping. Akan tetapi, tampaknya upaya tersebut belum cukup untuk meningkatkan pemahaman para KPM dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendamping.

Interaksi Jejaring Kerja

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Muchlis Hamdi, yaitu faktor interaksi jejaring kerja. Jejaring kerja memiliki makna yang penting, yaitu sebagai wadah komunikasi yang terjalin antara individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut ditujukan untuk menghimpun berbagai ide dan informasi guna mencapai keberhasilan, baik secara individu maupun dalam kelompok (Sutrisno, 2017). Faktor ini dipergunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hubungan, kerja sama, dan distribusi wewenang antar pelaksana kebijakan. Terkait dengan faktor ini, penulis akan melakukan analisis untuk melihat sejauh mana tingkat kerja sama yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) berhubungan dengan prinsip-prinsip yaitu prinsip keterlibatan yang mewajibkan seluruh aktor pelaksana terlibat aktif dalam PKH agar dapat terlaksana dengan optimal. Keterlibatan tersebut meliputi pemangku kepentingan yang membuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran kebijakan. Hal tersebut berperan penting dalam menyokong keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor interaksi jejaring kerja memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciwangi. Faktor ini mencakup hubungan, kerja sama, dan distribusi wewenang antarpelaksana kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,

Dinas Kesehatan, pendamping PKH, dan kelompok sasaran PKH, merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Terjalannya kerja sama antar pelaksana kebijakan, pemerintah daerah, pendamping, sekolah, puskesmas, dan keluarga penerima manfaat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan PKH, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi kinerja pendamping, peran Dinas Sosial sebagai koordinator utama, serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas turut mendukung kelancaran implementasi Program Keluarga Harapan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan dan kerjasama yang terjalin dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan sudah berjalan dengan baik serta tugas dan wewenang yang sudah dilaksanakan dengan tepat.

Partisipasi Kelompok Sasaran

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor partisipasi kelompok sasaran. Partisipasi masyarakat berlandaskan pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat sasaran untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti (Theron & Mchunu, 2014). Partisipasi kelompok sasaran dalam menerapkan kebijakan dianggap sebagai suatu keharusan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menjadi transparan dan akuntabel. Kehadiran partisipasi atau kontribusi masyarakat dianggap krusial dalam menjalankan suatu kebijakan, karena tanpa hal tersebut, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan berhasil (Elu et al., 2021). Faktor partisipasi kelompok sasaran dipakai untuk mengamati dan menganalisis bagaimana penerimaan manfaat kegiatan

dan keterlibatan kelompok sasaran, dimana dalam program ini kelompok sasarannya adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penulis akan menggali lebih dalam dan menganalisis kebermanfaatannya dan kecukupan bantuan yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Ciwangi sudah sejauh mana.

Dari hasil analisis penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada faktor partisipasi kelompok sasaran, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Hal positif didapat dari penerimaan masyarakat terhadap program ini, dimana para KPM menyambut baik adanya program ini karena dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya di Desa Ciwangi. Kendala tersebut seperti kurangnya tingkat kesadaran para orang tua KPM akan pendidikan anak, kurangnya kemauan untuk memeriksakan kesehatan balita dan ibu hamil, absen dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, hingga penyalahgunaan bantuan PKH sebagai jaminan utang. Dari segi kontribusi kelompok sasaran sesuai dengan prosedur yang ada, kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya merupakan tindakan yang tidak berkontribusi implementasi program ini. Oleh karena itu, dari hasil analisis tersebut penulis menyimpulkan dari faktor partisipasi kelompok sasaran terhadap implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut belum berjalan dengan baik seutuhnya.

Sumber Daya

Faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

program menurut Muchlis Hamdi adalah faktor sumber daya. Menurut Edward III (1980), sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi program. Sumber daya tersebut meliputi staf yang memadai serta berkapabilitas untuk melaksanakan tugas-tugas, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Dalam subbab yang terakhir ini, penulis akan menganalisis ketersediaan dan kecukupan sumber daya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut. Hal yang akan dianalisis dalam subbab ini meliputi kecukupan anggaran, ketersediaan pelaksana, kecukupan peralatan, ketersediaan informasi, dan ketepatan teknologi.

Anggaran pelaksanaan PKH dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional para pendamping. Anggaran tersebut memang bukan tanpa alasan dikatakan belum mencukupi kebutuhan operasional para pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Pendamping PKH Desa Ciwangi diharuskan untuk melakukan salah satu tugasnya, yaitu verifikasi calon KPM, dimana mereka harus mendatangi rumah calon KPM tersebut. Akan tetapi, terkadang beberapa KPM ada yang rumahnya berlokasi sangat jauh dari kantor desa atau kantor kecamatan. Bahkan, salah satu RW yang ada di Desa Ciwangi, yaitu RW 11 atau Kampung Cidepok, mengharuskan pendamping menempuh waktu sekitar 1 jam untuk menjangkau calon KPM atau KPM yang berada di RW tersebut. Maka dari itu, pendamping PKH Desa Ciwangi berpendapat bahwa dana operasional yang diberikan belum mencukupi untuk kebutuhan operasional pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi.

Hal kedua yang termasuk dalam faktor sumber daya adalah ketersediaan pelaksana. Selain anggaran, ketersediaan sumber daya manusia merupakan hal yang tak kalah penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana ujung tombak kebijakan tersebut adalah pendamping PKH. Pendamping PKH menjadi ujung tombak untuk mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan sehingga para pendamping ini merupakan pendamping yang memiliki kualitas yang cukup baik dari segi ilmu pengetahuan, komunikasi, dan serta harus memiliki kuantitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam implementasi program ini. Dari segi kuantitas sumber daya manusia pendamping PKH, khususnya di Desa Ciwangi ini masih ditemukan adanya kekurangan. Pendamping PKH untuk Desa Ciwangi dapat dinilai kurang kuantitasnya, dimana hal tersebut terlihat adanya ketidakeimbangan perbandingan jumlah KPM dengan Pendamping yang menanganinya. Pada Kecamatan Balubur Limbangan, terdapat 7 pendamping PKH dan ada 14 desa, dimana perbandingannya yaitu 1 pendamping menangani 2 desa sekaligus. Untuk Desa Ciwangi sendiri, terdapat 824 KPM PKH. Desa Ciwangi merupakan desa dengan KPM PKH terbanyak di Kecamatan Balubur Limbangan. Dengan jumlah KPM yang cukup banyak, hal ini dinilai tidak seimbang karena perbandingannya antara pendamping dengan jumlah KPM. Selain kuantitas, kualitas SDM juga diperlukan agar dapat mendukung keberhasilan implementasi program. Kualitas pendamping PKH merupakan hal yang penting agar pendamping dapat memberikan kinerja yang terbaiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, kualitas

pendamping dapat diamati dari bagaimana kemampuan seorang pendamping membantu KPM dalam penyelesaian masalah terkait bantuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, disampaikan bahwa kualitas pendamping PKH Desa Ciwangi sudah baik dari segi komunikasi, pengetahuan akan program, dan penyelesaian masalah. Kualitas baik yang dimiliki oleh pendamping tersebut ada karena adanya proses seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan kemampuan yang dimiliki sehingga pendamping melakukan tugasnya dengan cukup baik. Selain itu, sampai saat ini belum ada pengaduan yang disampaikan mengenai kinerja dari pendamping PKH Desa Ciwangi, karena menurut informan yang diwawancarai, pendamping PKH Desa Ciwangi cukup bertanggung jawab dengan tugasnya.

Hal ketiga yang tergabung dalam faktor sumber daya adalah kecukupan peralatan. Kecukupan peralatan maksudnya disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan PKH. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa modul pembelajaran, alat peraga, gedung pertemuan, dan lain-lain yang dapat mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Salah satu peralatan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi adalah komputer dan koneksi internet. Komputer dan koneksi internet dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran masyarakat yang ingin menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk kebutuhan komputer dan koneksi internet, barang tersebut telah tersedia di Kantor Desa Ciwangi. Hal terakhir yang menjadi bagian dari sumber daya dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi adalah ketepatan teknologi. Pada

pelaksanaan PKH, diperlukan teknologi yang tepat dan berhasil, dimana pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan ini harus menyediakan fasilitas teknologi yang berkenaan dengan pelaksanaan PKH. Bertepatan dengan hal ini, Kementerian Sosial memfasilitasi pelaksanaan PKH ini dengan memanfaatkan teknologi, yaitu Kementerian Sosial membuat aplikasi yang digunakan untuk para pelaksana PKH. Aplikasi tersebut meliputi SIKS-NG, E-SDM, dan SIKS-Mobile. Dalam pelaksanaannya di Desa Ciwangi, pendamping PKH Desa Ciwangi telah memanfaatkan beberapa aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam hal pelaksanaan PKH, seperti misalnya dalam pemutakhiran data penerima PKH, permohonan pengajuan data, dan lain-lainnya. Dari hasil analisis penulis, pada faktor sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi dapat dikatakan belum tercukupi seluruhnya. Hal-hal yang sudah tercukupi meliputi kualitas pelaksana, sarana dan prasarana, keterediaan informasi, dan pemanfaatan teknologi. Hal-hal yang belum tercukupi yaitu anggaran operasional para pelaksana PKH dan kuantitas pelaksana PKH.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi program tersebut belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang berdampak pada keberhasilan implementasi program belum dapat dipenuhi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari implementasi program

tersebut. Dalam dimensi substansi kebijakan, walaupun absennya peraturan daerah dalam payung hukum PKH, Permensos Nomor 1 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya sudah cukup untuk memberikan perintah dan ketentuan yang rinci kepada para pelaksana PKH. Peraturan yang ada pun sudah selaras dengan peraturan-peraturan lainnya.

Dimensi perilaku tugas pelaksana dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi hampir terpenuhi dengan baik. Motivasi yang dimiliki oleh para pelaksana PKH cukup kuat untuk membuat mereka bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga dalam hal penyalahgunaan wewenang dapat dicegah karena para pelaksana memiliki SK dan Kode Etik SDM PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal kemampuan pembelajaran, pendamping PKH Desa Ciwangi melakukan penyesuaian dengan KPPM dalam melaksanakan tugasnya, walaupun memang upaya tersebut belum berhasil untuk meningkatkan pemahaman KPM akan materi yang disampaikan. Dalam dimensi interaksi jejaring kerja, kerja sama antar para pelaksana PKH sudah cukup baik. Berbagai usaha komunikasi dan koordinasi antar pelaksana sudah dilakukan dengan baik, begitu pula dengan pembagian wewenangnya. Dalam dimensi partisipasi kelompok sasaran, didapatkan hasil analisis bahwa partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi belum berjalan dengan baik. Walaupun masyarakat menyambut baik program tersebut, terdapat para KPM yang tidak melaksanakan berbagai kewajibannya sebagai KPM. Hal tersebut berpotensi membuat program ini tidak tercapai tujuannya.

Dimensi yang terakhir, yaitu sumber daya, didapatkan hasil analisis bahwa

sumber daya untuk pelaksanaan PKH di Desa Ciwangi belum tercukupi sepenuhnya. Anggaran operasional dan kuantitas pendamping PKH masih menjadi kendala dalam kecukupan sumber daya pendukung program ini. Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Ciwangi Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa kekurangan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); ke-1). CV. Syakir Media Press.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- BPS. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. www.bps.go.id.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edi). California: SAGE Publications, Inc.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (Fifteenth). Pearson Education, Inc.
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968–973. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.781>
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121-134.
- Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. (2014). *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik Dan Metode*. Bandung: Nusa Media
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik (Cet 1; Mustrose, ed.)*. Semarang: Widya Karya.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Analisis data kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial*.
- Kadir, A. (2020). *FENOMENA KEBIJAKAN PUBLIK dalam perspektif administrasi publik di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (Cet 1)*. Gorontalo: UNG Press.
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23-37.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. In *Kedai Aksara*.
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 180-193.

- Muhafidin, H. D., SIP, M. S., Yadiman, H., & SH, M. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik: Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Muhafidin, D. (2022). Policy strategies to reduce the social impact of stunting during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(2), 320-342.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 1-6.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development): Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik (Edisi Ke-4)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan (ke-1)*. Penerbit Ombak.
- Suwardi, I. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. In Bandung: PT. Refika Aditama
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Theron, F. dan N. Mchunu. 2014. *Public Participation as a MicroLevel Development Strategy: the Principles and Context for Authentic and Empowering Development in* Theron, F. and Davids, I. (eds.).
- Development, the State and Civil Society in South Africa. Hatfield: Van Schaik.
- Vidyastuti, V. L., Halimah, M., & Halim, H. A. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 426-431.
- Yacoub, Y. 2010. Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos vol.8*